



PERATURAN DESA KROWE  
NOMOR : 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
AKHIR MASA JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KROWE

- Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir masa Jabatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5539);  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan  
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015  
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia tahun 2014 Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun  
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
2091 );
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun  
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita  
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016  
Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik  
Indonesia tahun 2016 Nomor 1099);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016  
Tentang Adminitrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara  
Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun  
2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita  
Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 611)
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018  
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita  
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
  10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di  
Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten  
Magetan Tahun 2018 nomor 57);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014-2019, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Magetan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Krowe  
Pada tanggal : 27 Agustus 2019  
KEPALA DESA KROWE

SUDJAK, S.Ag

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Magetan
2. Yth. Bapak Camat Lembeyan
3. Yth. Ketua BPD Krowe

## **PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa).

RPJMDesa dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahunnya, yang pelaksanaannya diuraikan dalam APBDES setiap tahun dan realisasi pelaksanaannya dilaporkan dalam Laporan Kepala Desa yang terdiri dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (LKPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan dan Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-

tugas dan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam satu periode jabatan Kepala Desa.

### **1.1 DASAR HUKUM**

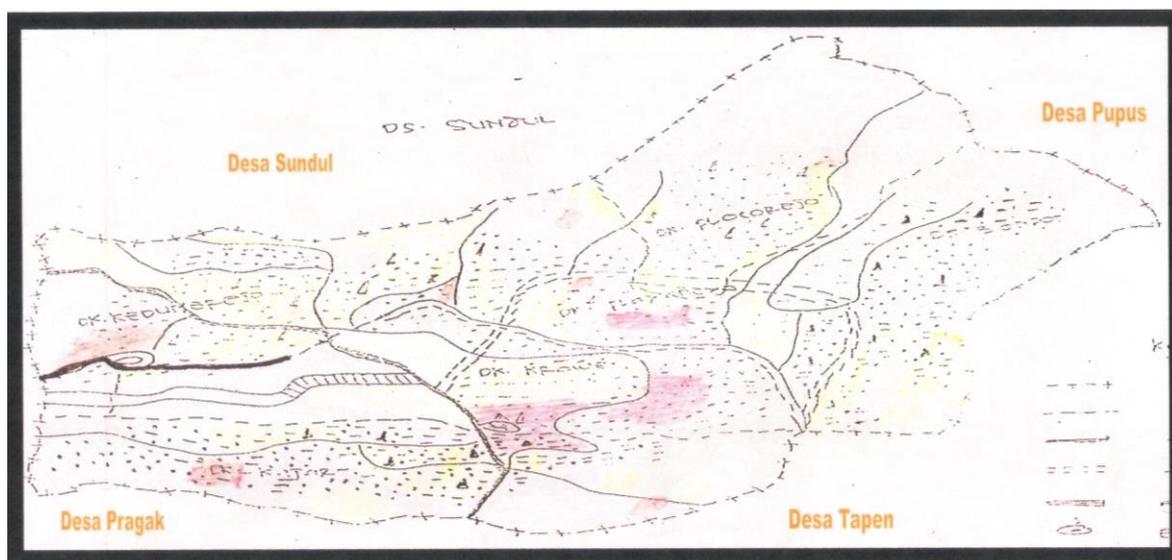
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679),
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 611)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1099);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Adminitrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 nomor 57);

## 1.2 GAMBARAN UMUM DESA

### 1.2.1 KONDISI GEOGRAFIS

Gambar 1.1



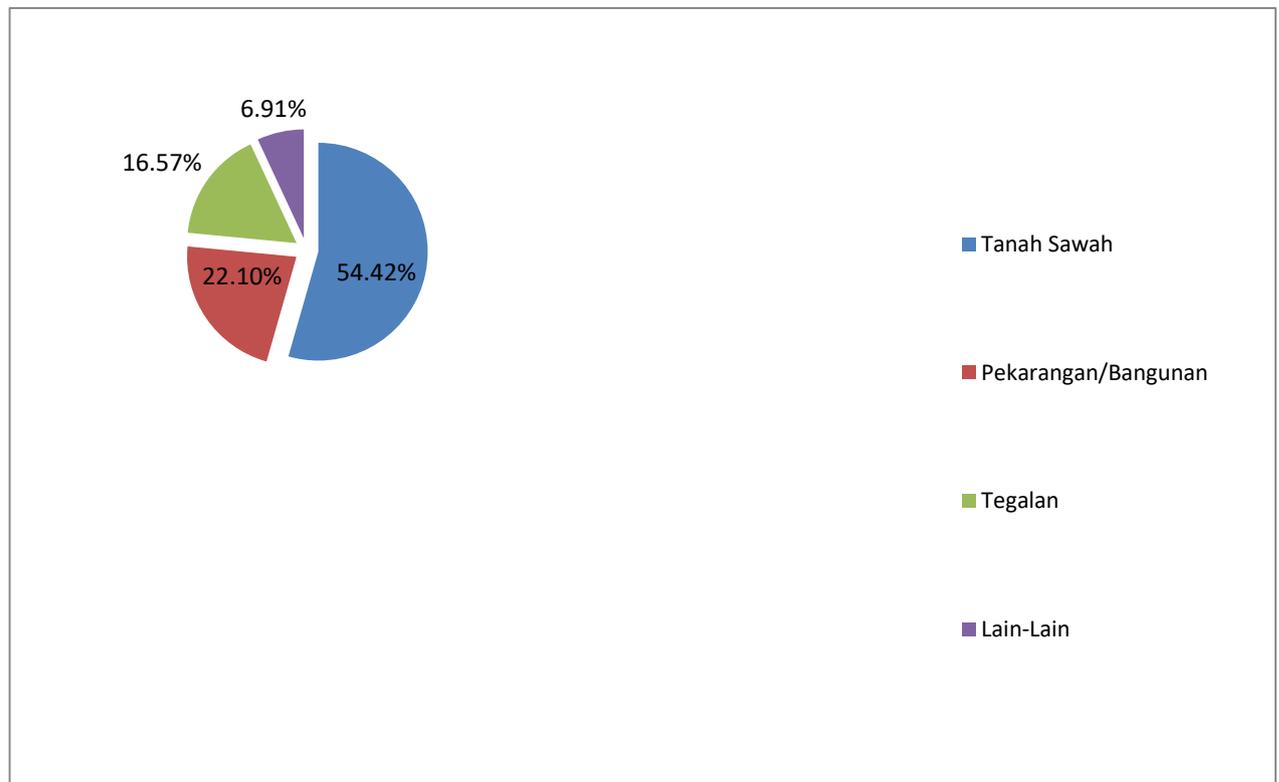
Desa Krowe menurut data dari Statistik hasil Pemetaan tahun 2011 dengan alat ukur GPS berada pada  $LONG 7^{\circ}43'58.7''S 111^{\circ}22'21.5'' E$  ( Bujur Timur / BT ) dan  $RAT -7.732965, 111.372637^{\circ}S$  (Lintang Selatan / LS), dengan batas-batas desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Sundul
- Sebelah Timur : Desa Pupus
- Sebelah Selatan : Desa Tapen
- Sebelah Barat : Desa Pragak

Luas wilayah Desa Krowe seluas 745,5 Ha, yang terdiri dari :

- a. Sawah : 197 ha.
- b. Tanah bukan sawah
  - Pekarangan : 80 ha.
  - Tegal : 60 ha.
  - Tambak/kolam : - ha.
  - Hutan : - ha.
  - Lainnya : 25 ha.

Gambar 1.2  
Luas Wilayah Dalam  
Grafik



Berdasarkan topografi, Desa Krowe memiliki karakteristik wilayah yang beranekaragam antara lain terletak pada ketinggian dari permukaan laut antara  $\pm 650$  M / dpl.

Jenis iklim yang ada di desa Krowe adalah Iklim Tropis dengan suhu rata-rata  $30^{\circ}\text{C}$ , sedangkan suhu maksimum bisa mencapai  $32^{\circ}\text{C}$ .

Adapun Desa Krowe secara administratif terdiri dari 6 dusun dengan jumlah RW sebanyak 12 dan RT sebanyak 51, sebagaimana berikut :

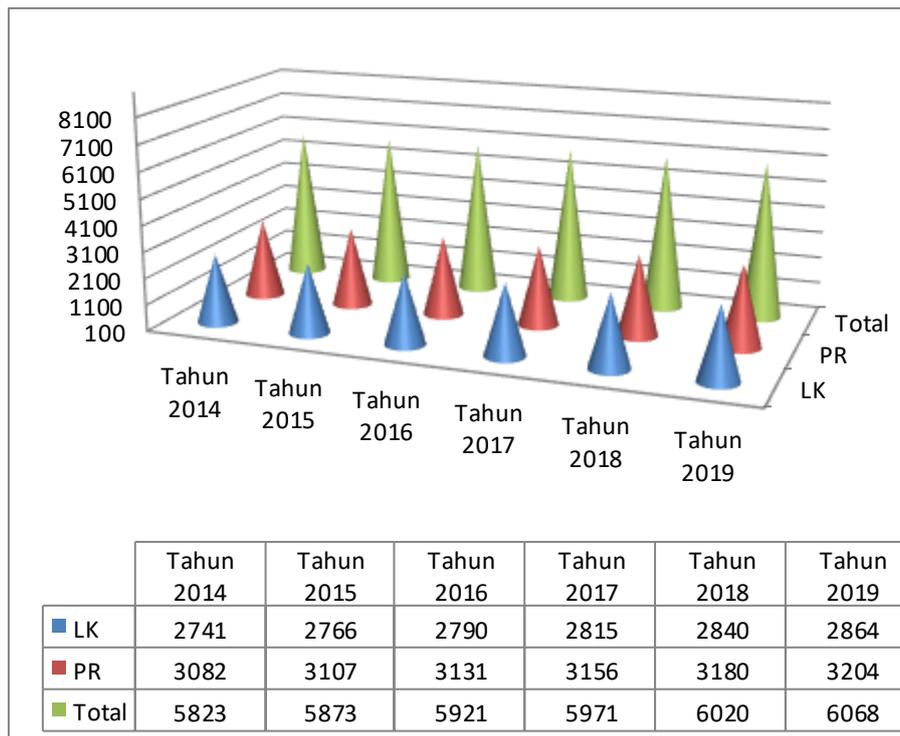
1. Dusun Kajar terdiri dari : 2 RW dan 10 Lingkungan RT.
2. Dusun Krowe terdiri dari : 2 RW dan 8 Lingkungan RT.
3. Dusun Kedungrejo terdiri dari : 2 RW dan 10 Lingkungan RT.
4. Dusun Playangan terdiri dari : 2 RW dan 8 Lingkungan RT.
5. Dusun Plosorejo terdiri dari : 2 RW dan 8 Lingkungan RT.
6. Dusun Bondot terdiri dari : 2 RW dan 7 Lingkungan RT.

### 1.2.2 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

a. Jumlah Penduduk

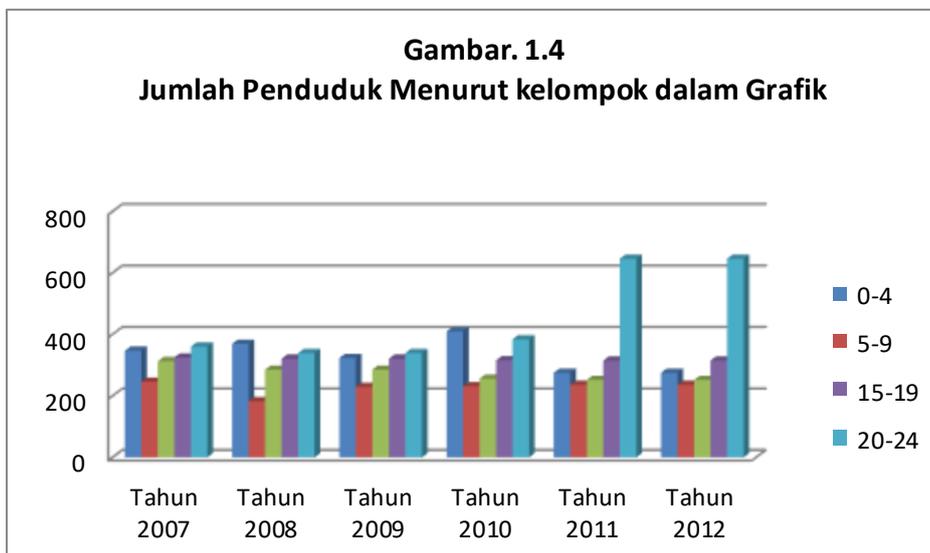
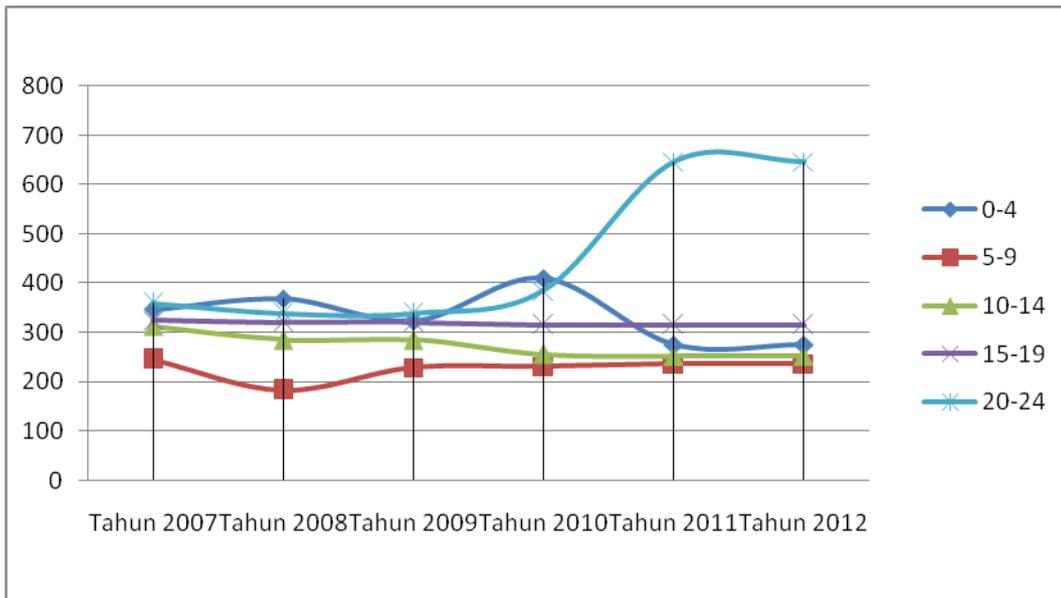
Jumlah penduduk Desa Krowe pada tahun 2014 sebesar 5823 jiwa terdiri dari 2741 jiwa laki-laki dan 3082 jiwa perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,99 % dalam tiga tahun terakhir. Tingkat kepadatan, di Desa Krowe rata-rata sebesar 0,135 jiwa per km<sup>2</sup> . Adapun penyebaran penduduk perdesun dari tahun 2014 s.d 2019 sebagai berikut

Gambar. 1.3  
Jumlah KK dan Penduduk dalam Grafik



Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur adalah sebagai berikut

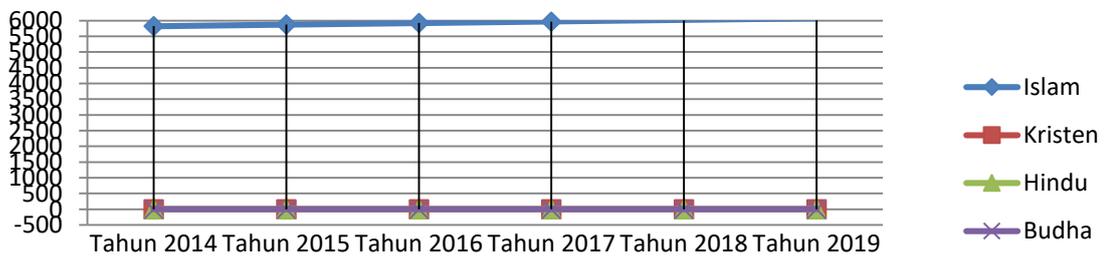
Tabel 1.2  
Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Menurut Kelompok Umur



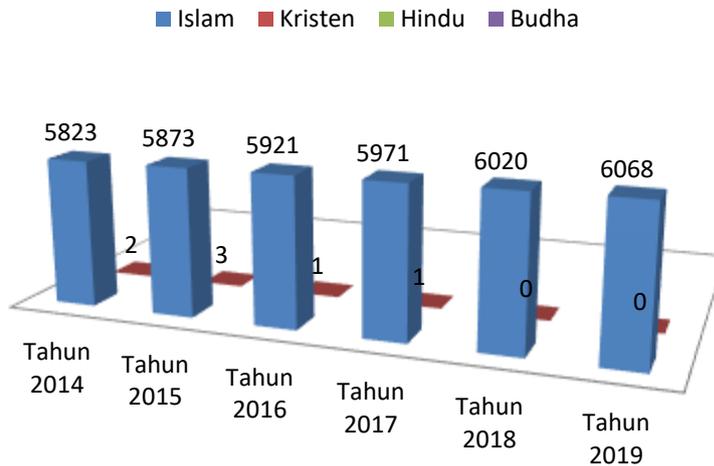
**b. Keagamaan Penduduk**

Penduduk Desa Krowe Mayoritas memeluk agama Islam dan sebagian kecil memeluk agama lain yaitu Kristen Katolik sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Struktur Pemeluk Agama**

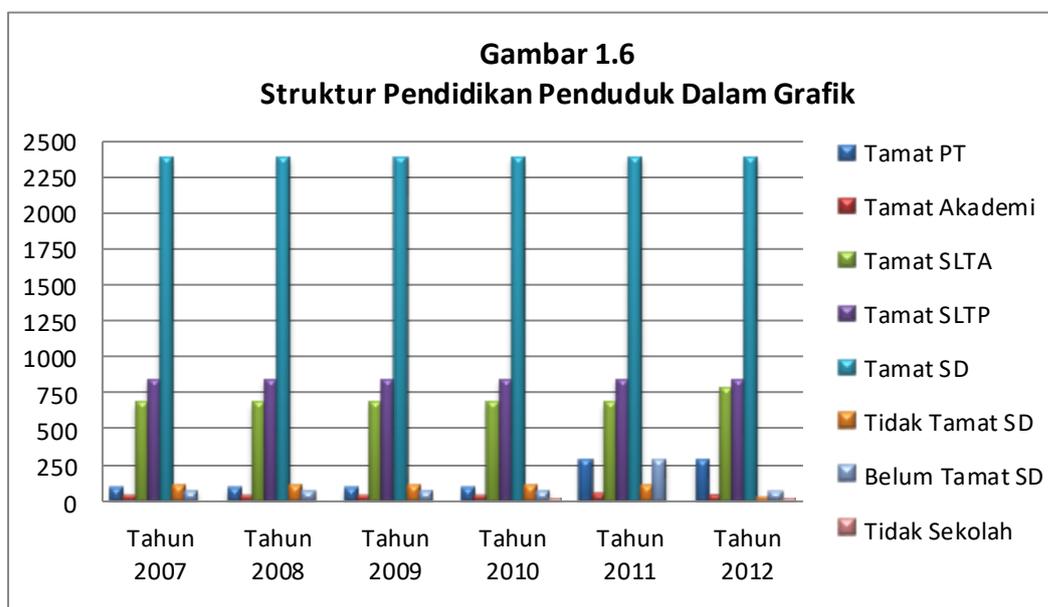
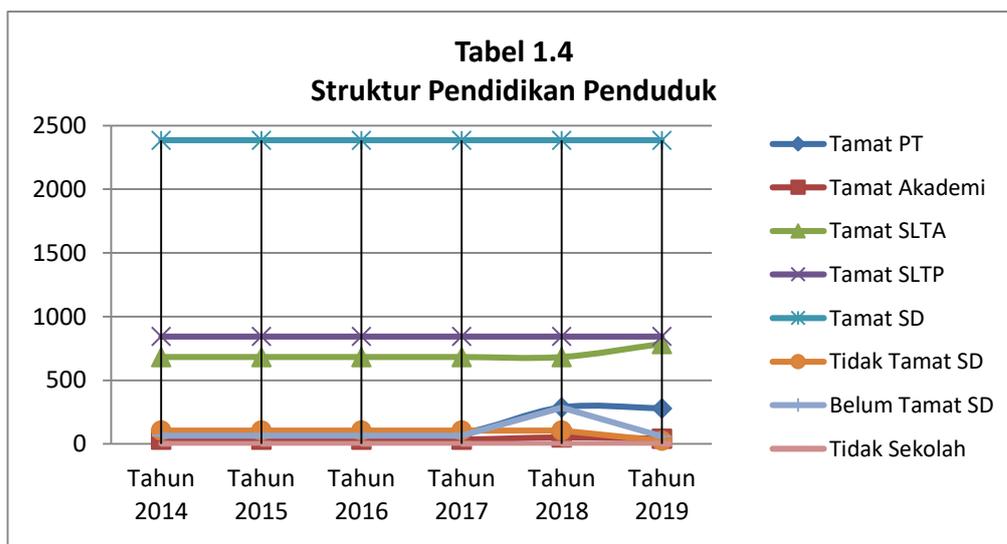


**Gambar 1.5**  
**Jumlah penduduk menurut agama**



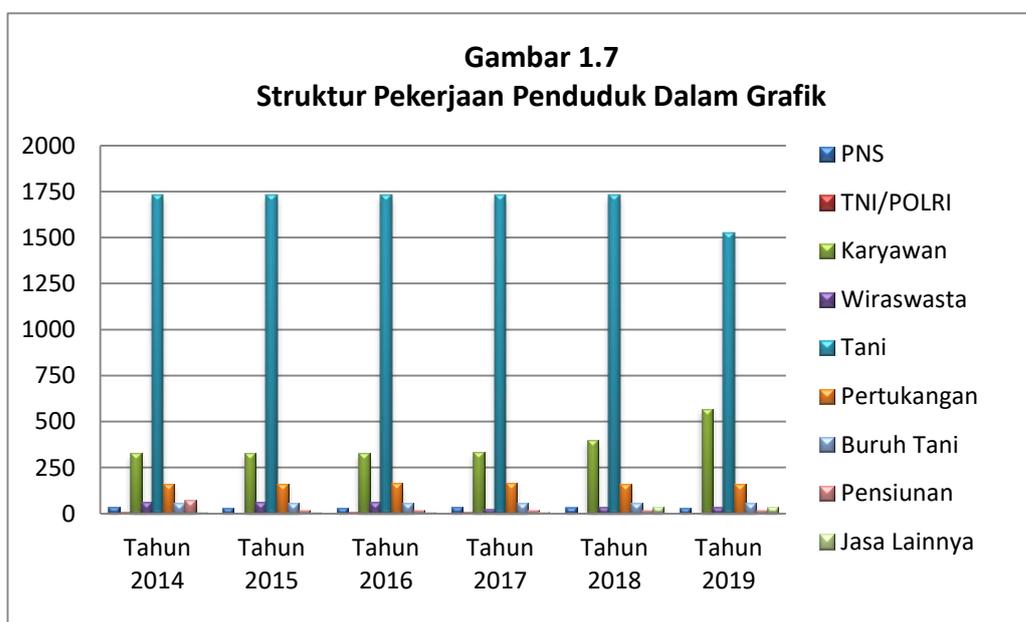
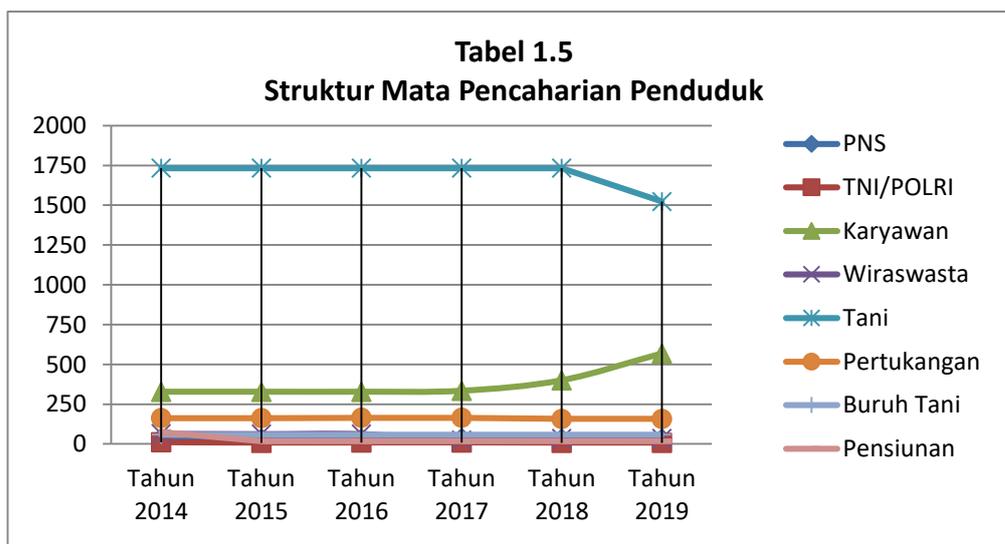
c. Pendidikan Penduduk

Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan penduduk Desa Krowe untuk usia 5 (lima) tahun ke atas sebagai berikut :



### 1.2.3 KONDISI EKONOMI

Desa Krowe adalah desa pertanian, karena masyarakat sebagian besar bekerja dalam bidang pertanian, sedangkan yang lainnya adalah wiraswasta, jasa dan lain-lain, sebagaimana dalam tabel struktur mata pencaharian penduduk sebagai berikut :



a. Potensi unggulan desa

Desa Krowe mempunyai beberapa potensi unggulan yang bisa dikembangkan sebagaimana berikut :

- Usaha pertanian berupa jagung, kedelai, padi, Kacang tanah
- Usaha industri pengolahan pangan ( kripik tempe, ayam panggang, lempeng, rengginan )

b. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tertentu baik secara menyeluruh maupun sektoral dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga konstan, adapun PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto/nilai output akhir yang ditimbulkan oleh berbagai sektor lapangan usaha yang

melakukan kegiatan usahannya disuatu daerah tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Dengan demikian perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalamipertumbuhan apabila terdapat peningkatkan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

Berdasarkan pertumbuhan PDRB Desa Krowe Tahun 2013-2019 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Desa Krowe tahun 2013 mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi karena dalam sektor pendapatan dari sektor pertanian terjadi kegagalan akibat serangan hama Potong leher yang melanda di Desa Krowe pada dua musim tanam padi akan tetapi mengalami peningkatan pendapatan dalam penanam jagung dan kacang tanah.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

#### 2.1 VISI DAN MISI

Dalam awal kepemimpinan saya menjadi Kepala Desa, kami mengusung Visi dan Misi sebagai berikut :

***“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat magetan yang adil dan bermartabat, dan terwujudnya masyarakat desa Krowe sejahtera yang bermartabat dan mandiri”.***

Misi dan Program Desa Peragak :

Dan untuk melaksanakan visi Desa Krowe dilaksanakan misi dan program sebagai berikut :

##### 1. Pembangunan Jangka Panjang

- a. Meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat ;
- b. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan usaha kecil dan bantuan modal;
- c. Meningkatkan derajat kehidupan politik yang demokratis;
- d. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
- e. Meningkatkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dan lembaga desa;
- f. Mewujudkan masyarakat yang terampil dan mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri melalui pelatihan-pelatihan;
- g. Mewujudkan kerjasama/kemitraan yang harmonis antara masyarakat aparat dan lembaga-lembaga desa serta kaum peduli dalam melaksanakan pembangunan;
- h. Mewujudkan Desa Krowe menjadi Desa yang selalu terdepan dengan memanfaatkan sektor-sektor unggulan;
- i. Mewujudkan insan pembangunan yang beriman dan bertaqwa sebagai modal pembangunan manusia yang berkualitas;
- j. Pembinaan generasi muda lewat organisasi sosial keagamaan dan karang taruna;

## 2. Pembangunan Jangka Pendek

- a. Menjaga dan melestarikan adat istiadat desa terutama yang telah mengakar lama di desa Krowe ;
- b. Meningkatkan pelayanan bidang Pemerintahan kepada warga masyarakat ;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana perhubungan dan pemasaran ;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian bagi masyarakat;
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan Sumber Daya Manusia Desa Krowe ;
- f. Meningkatkan taraf kesehatan dengan meningkatkan peran aktif bidan desa dan posyandu.

Namun semenjak tahun 2010, Visi dan Misi Desa Krowe disesuaikan dengan Peraturan Desa Krowe Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2014 – 2019. Disebutkan bahwa Visi Desa Krowe adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat magetan yang adil dan bermartabat, dan terwujudnya masyarakat desa Krowe sejahtera yang bermartabat dan mandiri”.***

Dan untuk melaksanakan visi Desa Krowe dilaksanakan misi dan program sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Bidang pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak

## **2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA**

Arah kebijakan pembangunan desa secara garis besar dapat ditempuh melalui 8 (delapan) agenda Pembangunan untuk Tahun 2014-2019. Agenda Pembangunan tersebut akan dapat dicapai melalui beberapa

tahapan dalam pembangunan. Agar masing-masing tahapan dalam pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu didukung dengan kebijakan yang matang dan komprehensif. Oleh karena itu arah kebijakan dari masing-masing tahapan dalam pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa ( PAD )
- b. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan pencapaian program.
- c. Meningkatkan pelayanan publik dalam perijinan dan kemudahan usaha.
- d. Mengembangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang luhur.
- e. Mendorong partisipasi dan keswadayaan dalam setiap pembangunan.

### **2.3 PRIORITAS DESA**

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
  - a. Penyediaan Sarana dan prasarana Pendidikan
  - b. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
  - a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.
  - b. Kesehatan masyarakat.
  - c. Penyehatan Lingkungan.
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
  - a. Memperlancar arus transportasi.
  - b. Mempermudah akses menuju pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, Pasar dan Pariwisata.
  - c. Merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Pengelolaan kekayaan alam yang berwawasan lingkungan.
  - b. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat.

**BAB III**  
**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SELAMA MASA**  
**JABATAN**

**3.1 PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA**

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Nama Pejabat Pemerintah Desa Krowe

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	SUDJAK, S.Ag	Kepala Desa
2	-	Sekretaris Desa
3	YULIATIN	Kaur Umum dan Pemerintahan
4	LILIS AGUSTIN	Kaur Keuangan
5	WURI LESTARI	Kaur Perencanaan
6	JIMUN	Staf Kaur Perencanaan
7	BAGUS NUGROHO	Staf Kasi Pemerintahan
8	WARBITO	Staf Kasi Pemerintahan
9	SAMURI	Kasi Kesejahteraan

10	M. TASMANTO	Staf Kasi Kesejahteraan
11	MARSONO	Kasi Pelayanan
12	SARBINI	Staf Kasi Pelayanan
13	SAMIRAN	Kasun Kajar
14	SYARIFAHUDIN	Kasun Krowe
15	MAKSUM	Kasun Kedungrejo
16	SRIYATUN	Kasun Playangan
17	BIBIT	Kasun Plosorejo
18	MARJUKI	Kasun Bondot

### 3.2 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

#### 3.2.1 RINCIAN KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	36
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	
		c. Peraturan Kepala Desa	
		d. Keputusan Kepala Desa	43
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	3159
		2) Perempuan	3309
		3) Jumlah Kepala Keluarga	1891
		4) Jumlah Anggota Keluarga	4577
		5) Jumlah Jiwa	6468
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:			
1) Pendidikan Umum	5124		
2) Pendidikan Khusus	1344		
3.	Pertanahan.	c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:	
		1) PNS	52
		2) TNI	10
		3) Swasta	931
		a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	3150
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	-

		3) Sertifikat Hak Pakai	150
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	484 ha
		2) Belum Bersertifikat	261 ha
		3) Tanah Kas Desa	20 ha
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	150 km
		2) Tanah Ladang	-
		3) Bangunan Umum	278 ha
		4) Perumahan	278 ha
		5) Ruang Fasilitas Umum	-
		d. Tanah yang Belum Dikelola	
		1) Hutan	300 ha
		2) Rawa-rawa	-
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	0
		2) Non PNS	17
		b. Jumlah Anggota BPD	9
		c. Musyawarah Desa	6
		d. Musrenbangdes	1
		e. Musyawarah BPD	4
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	36
		2) Alat Pemadam kebakaran	0
		3) Jumlah Hansip Terlatih	36
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	-
		2) Jumlah Bencana Alam	-
		3) Jumlah Operasi Penertiban	-
		4) Jumlah Pos Keamanan	6
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	-
6.	Pembinaan lembaga kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) Rt/Rw - Ada/Tidak	RT,51 RW,12
		2) PKK - Ada/Tidak	28
		3) Karang Taruna - Ada/Tidak	32
		4) Pos Pelayanan Terpadu - Ada/Tidak	10
		5) LPM - Ada/Tidak	9
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	
		d. Lembaga Kemasyarakatan di ikut sertakan dalam pelaksanaan program sector dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	
		e. Lembaga Adat - Ada Tidak	
		f. Lembaga adat dibentuk dengan	

		peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan - Ya/Tidak	
--	--	--	--

### 3.2.2 RINCIAN KEGIATAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	15 km
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	2 km
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	13
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	1
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/SekolahTinggi (Jumlah)	1 6 6 2 - -
		b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)	- - - - -
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah)	- - - - - - 1 - -
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah)	1 - - - - - -

		2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah)	-
		3). Panti Wordo (Jumlah)	-
		4). Panti Jompo (Jumlah)	-
		d. Sarana Komunikasi:	
		1). Radio Komunitas (Jumlah)	-
		2). Papan Pengumuman (Jumlah)	6
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)	-
		b. Industri Besar (Jumlah)	-
		c. Industri Sedang (Jumlah)	-
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	-
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	-
		f. Hotel (Jumlah)	-
		g. Restoran/RumahMakan (Jumlah)	-
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	2

### 3.2.3 RINCIAN KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

No	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:	
		1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	2 kali
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	2 kali
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	2 kali
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	2 kali
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	2 kali
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	2 kali
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	2 kali
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	2 kali
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	2 kali
		b. Masyarakat menyampaikan	3 kali

		informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	2 kali
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	2 kali
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	2 kali
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	2 kali
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	2 kali
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	2 kali
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	-
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	17
		f. Remaja Gereja (jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	1
		b. Penampung Pekerja keluar negeri (Jumlah)	-

### 3.2.4 RINCIAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	2 kali
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	2 kali
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	2 kali
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	2 kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	2 kali
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	2 kali

		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	2 kali
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	2 kali
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	2 kali
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	2 kali

### 3.3 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### 3.3.1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN 2014

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014	
1. Pendapatan Desa	Rp 577.843.559
2. Belanja Desa	Rp 577.843.559

#### 3.3.2 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2015

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015	
1. Pendapatan Desa	Rp. 1.760.541.415
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 499.501.518
b. Bidang Pembangunan	Rp. 957.030.079
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 26.046.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 275.463.818
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.758.041.415</u>
Surplus/Defisit	Rp. 2.500.000
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. -
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. -</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. -

#### 3.3.3 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2016

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016	
1. PendapatanDesa	Rp. 2.031.963.207
2. BelanjaDesa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 936.401.227
b. Bidang Pembangunan	Rp. 971.011.200
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 36.085.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 88.465.600
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja	<u>Rp 2.031.963.027</u>
Surplus/Defisit	Rp.-
3. Pembiayaan Desa	

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. -
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.-</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. -

### 3.3.4 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2017

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017	
1. PendapatanDesa	Rp.2.093.617.577
2. BelanjaDesa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 817.205.101
b. Bidang Pembangunan	Rp. 955.000.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 151.534.183
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 169.878.293
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja	<u>Rp.2.093.617.577</u>
Surplus/Defisit	Rp. -
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. -
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. -</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. -

### 3.3.5 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2018

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018	
1. PendapatanDesa	Rp. 2.147.043.832
2. BelanjaDesa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 841.379.332
b. Bidang Pembangunan	Rp. 988.589.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 247.245.500
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 69.830.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.147.043.832</u>
Surplus/Defisit	Rp. -
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. -
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. -</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. -

3.3.6 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
2019

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019	
1. PendapatanDesa	Rp. 2.471.239.622
2. BelanjaDesa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.051.495.717
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.197.893.905
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 156.320.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 15.530.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.471.239.622</u>
Surplus/Defisit	Rp. -
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. -
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 50.000.000</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. -

**3.4 PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA**

3.4.1 Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3.4.1.1 Kegiatan-kegiatan dan tingkat pencapaian

Untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dan tingkat Pencapaiannya sebagai berikut:

ISIANNYA LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES DARI TH. 2014 SAMPAI 2019 BAGIAN BIDANG  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA



### 3.4.1.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019

#### Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2014

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Amat Zaenuri	Ketua	
2	Slamet	Sekretaris	
3	Damanhuri	Anggota	
4	Kasimin	Anggota	
5	Bibit	Anggota	

#### Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2015

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Bagus Nugroho	Ketua	
2	Marsono	Sekretaris	
3	Samuri	Anggota	
4	Jimun	Anggota	
5	Syarifahudin	Anggota	

#### Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2016

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4

1	Bagus Nugroho	Ketua	
2	Lilis Agustin	Sekretaris	
3	Maksum	Anggota	
4	Marjuki	Anggota	
5	Yuliatin	Anggota	

Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan  
Pemerintahan Tahun 2017

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Bagus Nugroho	Ketua	
2	Yuliatin	Sekretaris	
3	Samiran	Anggota	
4	Maksum	Anggota	
5	Sriyatun	Anggota	

Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan  
Pemerintahan Tahun 2018

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Bagus Nugroho	Ketua	
2	Bibit	Sekretaris	
3	Sugeng Sugiarto	Anggota	
4	Marjuki	Anggota	
5	Yuliatin	Anggota	

Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan  
Pemerintahan Tahun 2019

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Bagus Nugroho	Ketua	
2	Lilis agustin	Sekretaris	
3	Yuliatin	Anggota	
4	Sriyatun	Anggota	
5	Maksum	Anggota	

3.4.1.3 Permasalahan dan Penyelesaian dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Tahun 2014 sampai Tahun 2019

*( isinya permasalahan dan penyelesaian bidang Pemdес dari tahun 2014 sampai tahun 2019 kalau ada )*

3.4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

3.4.2.1 Kegiatan-kegiatan dan tingkat pencapaiannya

Untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dan tingkat Pencapaiannya sebagai berikut:

ISIANNYA LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES DARI TH. 2014 SAMPAI 2019 BAGIAN BIDANG  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

### 3.4.2.1 Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan  
Dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019

#### Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2014

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Purnomo	Ketua	
2	Warsito	Sekretaris	
3	Jamingin	Anggota	
4	M. Tasmanto	Anggota	
5	Samiran	Anggota	

#### Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Warsito	Ketua	
2	Purnomo	Sekretaris	
3	Jamingin	Anggota	
4	M. Tasmanto	Anggota	
5	Samiran	Anggota	

#### Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Warsito	Ketua	

2	Purnomo	Sekretaris	
3	Jamingin	Anggota	
4	M. Tasmanto	Anggota	
5	Samiran	Anggota	

Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan  
Tahun 2017

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Samuri	Ketua	
2	Syarifahudin	Sekretaris	
3	Jimun	Anggota	
4	M. Tasmanto	Anggota	
5	Warsito	Anggota	

Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan  
Tahun 2018

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Samuri	Ketua	
2	Syarifahudin	Sekretaris	
3	Jimun	Anggota	
4	M. Tasmanto	Anggota	
5	Warsito	Anggota	

Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan  
Tahun 2019

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Samuri	Ketua	
2	Syarifahudin	Sekretaris	
3	Jimun	Anggota	
4	M. Tasmanto	Anggota	
5	Warsito	Anggota	

3.4.2.2 Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan dan Penyelesaian dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan dari Tahun 2014 sampai Tahun 2019

( *isinya permasalahan dan penyelesaian bidang Pelaksanaan Pembangunan dari tahun 2014 sampai tahun 2019 kalau ada* )

3.4.3 Bidang Pembinaan Masyarakat

3.4.3.1 Kegiatan-kegiatan dan tingkat pencapaian

Untuk bidang Pembinaan Masyarakat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dan tingkat Pencapaiannya sebagai berikut:

ISIANNYA LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES DARI TH. 2014 SAMPAI 2019 BAGIAN BIDANG  
PEMBINAAN MASYARAKAT

### 3.4.3.2 Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019

#### Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Tahun 2014

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Sarbini	Ketua	
2	Damanhuri	Sekretaris	
3	Suparlan	Anggota	
4	Supartini	Anggota	
5	Jumadi	Anggota	

#### Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Tahun 2015

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Sarbini	Ketua	
2	Damanhuri	Sekretaris	
3	Suparlan	Anggota	
4	Supartini	Anggota	
5	Jumadi	Anggota	

#### Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Tahun 2016

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Sarbini	Ketua	

2	Damanhuri	Sekretaris	
3	Suparlan	Anggota	
4	Supartini	Anggota	
5	Jumadi	Anggota	

Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat  
Tahun 2017

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Marsono	Ketua	
2	Yuliatin	Sekretaris	
3	Maksum	Anggota	
4	Marjuki	Anggota	
5	Bibit	Anggota	

Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat  
Tahun 2018

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Marsono	Ketua	
2	Sarbini	Sekretaris	
3	Wuri Lestari	Anggota	
4	Sriyatun	Anggota	
5	Bambang Suwarno	Anggota	

Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat  
Tahun 2019

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Yuliatin	Ketua	
2	Marsono	Sekretaris	
3	Sarbini	Anggota	
4	Samiran	Anggota	
5	Syarifahudin	Anggota	

3.4.3.3 Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan dan Penyelesaian dalam Bidang Pembinaan Masyarakat dari Tahun 2014 sampai Tahun 2019

( *isinya permasalahan dan penyelesaian bidang Pembinaan Masyarakat dari tahun 2014 sampai tahun 2019 kalau ada* )

3.4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

3.4.4.1 Kegiatan-kegiatan dan tingkat Pencapaian

Untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dan tingkat Pencapaiannya sebagai berikut:

ISIANNYA LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES DARI TH. 2014 SAMPAI 2019 BAGIAN BIDANG  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



### 3.4.4.2 Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019

#### Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Damanhuri	Ketua	
2	Slamet	Sekretaris	
3	Warsito	Anggota	
4	M.Tasmanto	Anggota	
5	Yuliatin	Anggota	

#### Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Damanhuri	Ketua	
2	Slamet	Sekretaris	
3	Warsito	Anggota	
4	M.Tasmanto	Anggota	
5	Yuliatin	Anggota	

#### Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Bibit	Ketua	

2	Suparlan	Sekretaris	
3	Syarifahudin	Anggota	
4	Lilis Agustin	Anggota	
5	Sriyatun	Anggota	

Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
Tahun 2017

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Marsono	Ketua	
2	Wuri Lestari	Sekretaris	
3	Bagus Nugroho	Anggota	
4	Jamingin	Anggota	
5	Maksum	Anggota	

Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
Tahun 2018

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Marsono	Ketua	
2	Yuliatin	Sekretaris	
3	Warsito	Anggota	
4	M. Tasmanto	Anggota	
5	Samiran	Anggota	

Data Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
Tahun 2019

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Yuliatin	Ketua	
2	Marsono	Sekretaris	
3	Wuri Lestari	Anggota	
4	Jimun	Anggota	
5	Marjuki	Anggota	

3.4.4.3 Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan dan Penyelesaian dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dari Tahun 2014 sampai Tahun 2019

( *isinya permasalahan dan penyelesaian bidang Pemberdayaan Masyarakat dari tahun 2014 sampai tahun 2019 kalau ada* )

6.4.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Bidang ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa apabila ada kejadian Bencana Alam atau Keadaan darurat lainnya.

## **BAB IV**

### **KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH**

#### **4.1. Keberhasilan yang dicapai**

Keberhasilan yang dicapai dalam kegiatan Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Krowe Tahun Anggaran 2014-2019 yaitu semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Adapun adanya perubahan anggaran pendapatan desa dan adanya kegiatan mendesak, dilaksanakan dengan Perubahan Anggaran Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAK APBDDes) melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.

#### **4.2 Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh**

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan tersebut. Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mengerti dan memahami serta mendukung sepenuhnya dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan diharapkan agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

Setiap permasalahan yang timbul dalam penyelesaiannya dilaksanakan dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama antar desa masih sekitar penyelesaian sengketa warga. Dan apabila dalam

musyawarah tersebut belum berhasil maka diselesaikan ketingkat atasnya. Namun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik saat ini belum dilaksanakan.

#### **4.3 Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.**

Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Pemerintah Desa
  - b. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
  - c. Pelaksanaan Pilihan Kepala Desa (Pilkades)
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
  - a. Rehabilitasi Polindes
  - b. Perbaikan Saluran air
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
  - a. Kegiatan Bersih Desa
  - b. Kegiatan PHBN Agustusan
4. Pemberdayaan masyarakat
  - a. Kegiatan Posyandu lansia dan Posyandu balita
  - b. Kegiatan PKK
  - c. Kegiatan RTLH

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2014 s.d 2019 yang dapat kami sampaikan, meskipun belum mencapai keseluruhan harapan, namun perlu kami syukuri karena dalam perjalanan selama enam tahun ini tidak terdapat banyak hambatan yang dapat mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mudah-mudahan penyampaian LPPD Akhir Jabatan ini menjadi langkah strategis kami untuk dapat meningkatkan kinerja dan pengabdian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Krowe yang kami cintai bersama sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan kita masing-masing, bila di periode nanti kami mendapatkan amanah kembali.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak atas dukungan, bantuan dan peran serta yang telah mencurahkan perhatian tenaga dan pemikirannya dalam mensukseskan berbagai program kegiatan yang telah kami lakukan dalam tahun ini.

Kami berharap apa yang telah kami perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Desa Krowe. Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan bimbingan lahir dan bathin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianNya kepada kami semua untuk terus membangun Desa Krowe yang kami cintai ini semakin maju, mandiri makmur dan sejahtera, sehingga dapat memberikan sedikit sumbangsih bagi kemajuan Kabupaten Magetan.

Krowe, 27 Agustus 2019

Kepala Desa Krowe

SUDJAK, S.Ag

## **DAFTAR ISI**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB. I PENDAHULUAN**

- 1.1. Dasar Hukum
- 1.2. Gambaran Umum Desa
  - 1.2.1. Kondisi Geografis
  - 1.2.2. Gambaran Umum Demografis
  - 1.2.3. Kondisi Ekonomi

#### **BAB. II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

- 2.1. Visi dan Misi
- 2.2. Strategi dan arah kebijakan Desa
- 2.3. Prioritas Desa

#### **BAB. III LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SELAMA MASA JABATAN**

- 3.1. Program Kerja Pemerintahan Desa
- 3.2. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 3.3. Rincian APBDes
- 3.4. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Desa

#### **BAB. IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH**

- 4.1. Keberhasilan yang dicapai
- 4.2. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh
- 4.3. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 ( Lima )  
bulan sisa masa jabatan

#### **BAB. V PENUTUP**

